

## Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern; Pemikiran Umer Chapra Integration of Islamic Values into Modern Economic Policies; Umer Chapra Perspective

Lukman Hakim<sup>1\*</sup>, Muhammad Birusman Nuryadin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Prodi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, UIN Sultan Aji Muhammad Idris, Jl. KH. Abul Hasan No.3,  
Samarinda Kota, Kota Samarinda, 75243, Indonesia

\*E-mail: [lukmanuinsi24@gmail.com](mailto:lukmanuinsi24@gmail.com)

### ABSTRAK

*Submit:2024-11-16*  
*Revisi: 2024-11-20*  
*Disetujui:2024-12-02*

Integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi modern menjadi topik penting untuk dikaji, mengingat tantangan global seperti ketimpangan sosial, ketidakstabilan ekonomi, dan krisis lingkungan. Meski banyak studi membahas konsep ekonomi Islam, masih terdapat gap dalam implementasi praktisnya di kebijakan ekonomi modern. Studi ini mengidentifikasi relevansi nilai-nilai Islam dalam menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil dan inklusif, sebagaimana yang digagas oleh Umer Chapra. Rumusan masalahnya meliputi bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi dan sejauh mana pendekatan ini dapat menjawab tantangan global. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan data primer berupa karya Umer Chapra dan data sekunder dari literatur pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dan analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip utama seperti keadilan distributif, keberlanjutan, dan stabilitas ekonomi. Temuan utama menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam, seperti zakat dan keuangan syariah, tidak hanya memberikan solusi teoretis tetapi juga alternatif praktis untuk tatanan ekonomi global yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Studi ini merekomendasikan peningkatan literasi ekonomi Islam, pengembangan regulasi dan teknologi pendukung, serta kolaborasi internasional untuk mendorong implementasi nilai-nilai Islam secara lebih luas. Kelemahan studi ini adalah keterbatasan data empiris dan perluasan kajian politik yang dapat menjadi peluang penelitian di masa depan.

**Kata kunci:** *ekonomi Islam, Umer Chapra, zakat, keuangan syariah, kebijakan ekonomi*

### ABSTRACT

The integration of Islamic values into modern economic policies is a crucial topic of study, given global challenges such as social inequality, economic instability, and environmental crises. Although numerous studies have discussed the concept of Islamic economics, there remains a gap in its practical implementation within modern economic policies. This study identifies the relevance of Islamic values in creating a more equitable and inclusive economic system, as proposed by Umer Chapra. The research addresses the problem of how Islamic values can be integrated into economic policies and the extent to which this approach can address global challenges. This research employs a descriptive-analytical approach using primary data from Umer Chapra's works and secondary data from supporting literature. Data collection was conducted through library research, and thematic analysis was applied to identify key principles such as distributive justice, sustainability, and economic stability. The findings reveal that the integration of Islamic values, such as zakat and Islamic finance, provides not only theoretical solutions but also practical alternatives for a more

humane and sustainable global economic order. The study recommends improving Islamic economics literacy, developing regulatory and technological frameworks, and fostering international collaboration to promote broader implementation of Islamic values. The study's limitations include the scarcity of empirical data and the need for expanded political analysis, which future research could address

**Keywords:** *Islamic economics, Umer Chapra, zakat, Islamic finance, economic policy*

**How to Cite**

*Hakim, L., & Nuryadin, M. B. (2024). Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern: Pemikiran Umer Chapra. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 7(2). <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11855>*

Copyright © 2024 Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. All rights reserved.

---

## 1. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah menyaksikan berbagai krisis ekonomi yang mencerminkan kelemahan sistem keuangan global. Kapitalisme sebagai sistem dominan sering kali gagal memberikan kesejahteraan yang merata, sementara sosialisme menghadapi tantangan besar dalam mendorong efisiensi ekonomi (M. N. A. S. Adam et al., 2024). Ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi sumber daya, dan praktik ekonomi yang tidak beretika menjadi perhatian utama. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan mendesak untuk mempertimbangkan pendekatan alternatif yang tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga adil secara sosial. Islam, dengan nilai-nilai moral dan prinsip keadilan yang kuat, menawarkan pandangan unik dalam mengatasi masalah tersebut. Umer Chapra, salah satu pemikir terkemuka dalam ekonomi Islam, memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi modern untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan (Mufid, 2021).

Namun, meskipun konsep ekonomi Islam telah banyak dibahas, literatur yang ada sering kali terbatas pada penjelasan normatif tanpa eksplorasi yang mendalam mengenai implementasi praktisnya dalam kebijakan ekonomi kontemporer. Banyak studi lebih berfokus pada kritik terhadap sistem kapitalis dan riba, namun kurang memberikan solusi yang aplikatif. Selain itu, kajian tentang pemikiran Umer Chapra sering kali hanya menekankan pada aspek teoretis tanpa menggali relevansinya dalam menghadapi tantangan global seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, terdapat gap yang signifikan dalam literatur mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara konkret dalam kebijakan ekonomi modern yang inklusif dan berkelanjutan.

Beberapa studi terdahulu telah mencoba mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan ekonomi, tetapi hasilnya masih jauh dari harapan. Misalnya, penelitian tentang zakat sebagai alat redistribusi sering kali kurang memperhatikan kompatibilitasnya dengan sistem ekonomi modern. Sementara itu, pendekatan lain seperti penerapan keuangan syariah telah menunjukkan hasil yang menjanjikan, namun masih terbatas pada sektor perbankan dan belum mencakup dimensi ekonomi makro secara menyeluruh. Dalam konteks ini, pemikiran Umer Chapra menawarkan perspektif holistik yang mencakup dimensi moral, sosial, dan ekonomi (Rangkuti & Arif, 2024). Evaluasi terhadap studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk memformulasikan pendekatan yang lebih integratif dan aplikatif berdasarkan prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Chapra.

Artikel ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci: bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan secara praktis ke dalam kebijakan ekonomi modern? Sejauh mana konsep-konsep yang diajukan oleh Umer Chapra relevan dalam konteks global saat ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, artikel ini berargumen bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi modern tidak hanya memungkinkan tetapi juga mendesak untuk menciptakan tatanan ekonomi yang

lebih adil dan berkelanjutan. Dengan pendekatan analisis kritis terhadap pemikiran Chapra, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur dan memandu pengambilan kebijakan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

## 2. Metode

Studi ini memfokuskan pada isu integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan ekonomi modern dengan alasan utama bahwa pendekatan ini memiliki relevansi tinggi dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini, seperti ketimpangan sosial, eksploitasi ekonomi, dan krisis keberlanjutan. Pemikiran Umer Chapra dipilih sebagai fokus utama karena pendekatannya yang holistik dan aplikatif dalam menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan kebutuhan kebijakan modern. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi gap literatur yang kurang memberikan solusi aplikatif dalam implementasi nilai-nilai Islam pada kebijakan ekonomi. Dengan menggali lebih dalam pandangan Chapra, studi ini bertujuan untuk menawarkan perspektif baru yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga praktis untuk diadopsi dalam kebijakan ekonomi global.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan jenis studi literatur Review. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup teks dan tulisan asli Umer Chapra, termasuk buku, artikel jurnal, dan wawancara yang relevan (Tjiptono, 2023). Data sekunder berupa literatur pendukung, seperti hasil penelitian, laporan kebijakan ekonomi, dan dokumen terkait lainnya yang berhubungan dengan implementasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi. Pemilihan data dilakukan secara purposif untuk memastikan relevansi dan validitas sumber yang digunakan dalam mendukung argumen dan analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri sumber-sumber akademis yang terpercaya, termasuk database jurnal internasional, buku-buku terbitan ilmiah, dan laporan kebijakan (Putra, 2022). Setelah data dikumpulkan, tahapan analisis dilakukan dengan pendekatan interpretatif, yang melibatkan penelaahan kritis terhadap ide-ide dan argumen Chapra. Data dianalisis melalui proses coding tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama, seperti prinsip keadilan, keberlanjutan, dan distribusi kekayaan dalam pandangan Chapra. Analisis dilakukan secara iteratif dengan membandingkan data primer dan sekunder untuk menghasilkan temuan yang dapat mendukung tujuan penelitian.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Bentuk-Bentuk Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern

Salah satu bentuk integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi adalah melalui redistribusi kekayaan yang diwujudkan dalam mekanisme zakat, sedekah, dan wakaf. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban religius tetapi juga sebagai instrumen ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial. Penerapan zakat dalam kebijakan ekonomi dapat membantu menyediakan dana yang signifikan untuk memberdayakan kelompok miskin melalui program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi (Wulansari & Setiawan, 2013). Wakaf, di sisi lain, memiliki potensi besar dalam membiayai proyek infrastruktur sosial seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lainnya. Pengelolaan wakaf secara modern dengan menggunakan teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, menjadikannya relevan dalam sistem ekonomi kontemporer.

Keuangan syariah adalah salah satu contoh konkret bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi modern. Dengan prinsip utama menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), sistem ini menawarkan stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan sistem perbankan konvensional. Produk-produk keuangan syariah, seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah, memberikan solusi bagi kebutuhan pembiayaan tanpa menimbulkan beban bunga yang berlebihan (Qotrunnada & Yazid, 2022). Selain itu, sistem bagi hasil dalam keuangan syariah juga

mendorong hubungan yang lebih adil antara pemberi modal dan penerima modal. Implementasi keuangan syariah tidak hanya menarik bagi negara-negara Muslim tetapi juga mulai diterima di pasar global karena kestabilannya.

Umer Chapra menekankan pentingnya reformasi kebijakan fiskal dan moneter untuk mencerminkan nilai-nilai Islam (Fadllan, 2018). Salah satu contohnya adalah penerapan sistem pajak yang adil, di mana pajak dikenakan berdasarkan kemampuan individu tanpa membebani golongan ekonomi lemah. Selain itu, kebijakan moneter berbasis syariah, seperti penerapan sukuk (obligasi syariah), memberikan solusi alternatif untuk pembiayaan pemerintah tanpa bergantung pada sistem bunga. Pengendalian inflasi melalui pembatasan pencetakan uang yang tidak didukung oleh aset riil juga menjadi prinsip penting dalam sistem ekonomi Islam. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, kebijakan fiskal dan moneter dapat menjadi lebih stabil dan inklusif.

Nilai-nilai Islam menekankan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, praktik eksploitasi tenaga kerja, monopoli, dan penguasaan sumber daya oleh segelintir pihak dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Chapra mengusulkan kebijakan yang memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang ekonomi (Zainul Bahri et al., 2023). Misalnya, pemerintah dapat menerapkan regulasi untuk mencegah monopoli di sektor-sektor strategis dan memastikan persaingan usaha yang sehat. Dalam konteks modern, langkah ini dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih merata dan inklusif, di mana kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir elite.

Pembangunan ekonomi dalam pandangan Islam tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan kolektif. Pendekatan ini mencakup investasi dalam sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Umer Chapra menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan umum (maslahah), di mana manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak (Hanani & Kurniaty, 2022). Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang diusulkan tidak hanya menguntungkan individu tertentu tetapi juga memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.

Islam mengajarkan pentingnya nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Hal ini tercermin dalam prinsip amanah (kepercayaan) yang mengharuskan para pemimpin dan pembuat kebijakan bertindak demi kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks ekonomi modern, etika ini dapat diwujudkan melalui kebijakan yang melindungi kelompok rentan, mencegah eksploitasi, dan mendorong pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan menempatkan nilai-nilai etika sebagai landasan utama, kebijakan ekonomi yang dihasilkan akan lebih manusiawi dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang (Desiana & Afrianty, 2017).

Integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi juga menuntut inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu inovasi penting adalah pengelolaan dana sosial seperti zakat dan wakaf melalui teknologi digital, yang dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Selain itu, pengembangan produk-produk keuangan syariah baru, seperti sukuk hijau (green sukuk), menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat mendukung agenda keberlanjutan global. Umer Chapra juga menekankan pentingnya penelitian dan pengembangan untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam dapat terus relevan dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

### **3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemunculan Fenomena**

Ketimpangan ekonomi yang semakin melebar menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pencarian alternatif sistem ekonomi yang lebih adil, termasuk integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi modern. Data global menunjukkan bahwa 1% populasi terkaya di dunia menguasai hampir

separuh dari total kekayaan dunia, sementara jutaan orang hidup di bawah garis kemiskinan (Rahman, 2017). Ketidakadilan ini diperparah oleh sistem ekonomi konvensional yang lebih mengutamakan pertumbuhan tanpa memperhatikan distribusi kekayaan. Dalam konteks ini, pendekatan Islam yang menekankan distribusi kekayaan melalui zakat, sedekah, dan wakaf menawarkan solusi praktis untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

Kapitalisme, sebagai sistem ekonomi dominan, sering kali menghadapi kritik karena ketidakmampuannya menjaga stabilitas ekonomi. Krisis keuangan global seperti yang terjadi pada tahun 2008 menjadi bukti nyata kelemahan sistem berbasis riba dan spekulasi yang cenderung meningkatkan risiko instabilitas pasar (M. Adam, 2020). Sistem ini juga gagal menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, integrasi nilai-nilai Islam yang berbasis pada keadilan dan keberlanjutan dipandang sebagai alternatif yang dapat memberikan stabilitas dan kesejahteraan yang lebih merata.

Faktor lain yang memengaruhi kemunculan fenomena ini adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Sistem ekonomi konvensional yang berorientasi pada keuntungan sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan, menyebabkan degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Nilai-nilai Islam yang menekankan tanggung jawab terhadap alam (*khalifah fil ardh*) memberikan landasan etis untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih berkelanjutan (Novanda, 2023). Prinsip ini juga mendorong pengelolaan sumber daya alam yang adil dan bertanggung jawab untuk generasi mendatang.

Di tengah meningkatnya ketidakpuasan terhadap sistem ekonomi konvensional, kesadaran akan pentingnya nilai-nilai etika dalam ekonomi juga semakin meningkat. Banyak masyarakat dan pembuat kebijakan mulai menyadari bahwa sistem ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan aspek moral akan sulit menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, nilai-nilai Islam seperti kejujuran (*sidq*), keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab sosial memberikan kerangka kerja yang relevan untuk mengembangkan sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan etis.

Keberhasilan keuangan syariah dalam menyediakan alternatif sistem keuangan yang stabil dan bebas riba menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya fenomena integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi. Dalam beberapa dekade terakhir, keuangan syariah telah berkembang pesat di berbagai negara, termasuk negara-negara non-Muslim (Syarif & Prawito, 2020). Kesuksesan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam seperti pelarangan riba dan sistem bagi hasil dapat diterapkan secara luas tanpa mengurangi daya saing di pasar global. Keberhasilan ini juga mendorong minat untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip serupa dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi makro.

Tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan migrasi massal menuntut adanya model ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sistem ekonomi Islam, sebagaimana diusulkan oleh Umer Chapra, menawarkan solusi yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dengan meningkatnya tekanan untuk mereformasi sistem ekonomi global, pendekatan berbasis nilai-nilai Islam menjadi semakin relevan sebagai model alternatif yang mampu mengatasi tantangan multidimensi ini.

### **3.3 Implikasi Sosial dan Ekonomi dari Integrasi Nilai-Nilai Islam**

Salah satu implikasi sosial utama dari integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi adalah terciptanya sistem redistribusi kekayaan yang lebih adil. Instrumen seperti zakat, sedekah, dan wakaf berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi ketimpangan sosial dengan memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir individu (Zuchroh, 2024). Program redistribusi ini dapat memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat kurang mampu terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera secara keseluruhan.

Dalam konteks ekonomi, pelarangan riba memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas pasar. Sistem berbasis riba cenderung meningkatkan ketidakstabilan dengan memicu fluktuasi yang tidak terkendali, terutama di sektor keuangan. Keuangan syariah, dengan prinsip bagi hasilnya, menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara pemberi dan penerima modal (Al Arif, 2012). Hal ini tidak hanya mengurangi risiko spekulasi tetapi juga mendorong investasi pada sektor-sektor produktif, yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Integrasi nilai-nilai Islam juga memiliki implikasi pada inklusivitas ekonomi. Dengan memastikan distribusi sumber daya yang lebih merata, lebih banyak individu, termasuk kelompok marginal, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Misalnya, dana zakat dan wakaf dapat digunakan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sering kali kesulitan mendapatkan akses ke pembiayaan konvensional. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya mengurangi ketimpangan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.

Prinsip Islam yang menekankan keseimbangan (mizan) memiliki implikasi penting terhadap pembangunan berkelanjutan. Nilai-nilai ini mendorong pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana untuk memastikan keberlanjutannya bagi generasi mendatang. Dalam kebijakan ekonomi, hal ini dapat diwujudkan melalui investasi pada energi terbarukan, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada kelestarian lingkungan.

Nilai-nilai Islam menuntut kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial dan ekonomi. Implikasinya adalah reformasi sistem perpajakan dan subsidi untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara adil kepada mereka yang membutuhkan. Misalnya, pajak progresif berbasis kemampuan membayar dapat diterapkan untuk mengurangi beban pada masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, kebijakan subsidi yang selektif dapat membantu kelompok rentan mengakses kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Nilai-nilai Islam memberikan perhatian besar pada etika dan moralitas dalam dunia bisnis dan keuangan. Hal ini berimplikasi pada penciptaan budaya bisnis yang lebih bertanggung jawab, di mana keuntungan tidak diperoleh dengan cara-cara yang merugikan orang lain atau lingkungan. Misalnya, perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah diharuskan menghindari praktik eksploitasi tenaga kerja dan memastikan bahwa produknya halal dan bermanfaat. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Islam menciptakan ekosistem bisnis yang tidak hanya berfokus pada profit tetapi juga kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Implikasi jangka panjang dari integrasi nilai-nilai Islam adalah potensinya untuk mereformasi sistem ekonomi global. Dalam tatanan ekonomi saat ini, yang sering kali didominasi oleh kapitalisme neoliberal, pendekatan berbasis Islam menawarkan paradigma alternatif yang lebih etis dan inklusif. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip Islam, sistem ekonomi global dapat menjadi lebih adil, stabil, dan berorientasi pada keberlanjutan. Hal ini membuka peluang bagi negara-negara Muslim untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam menciptakan tatanan ekonomi dunia yang lebih seimbang dan manusiawi.

### **3.4 Relevansi Pemikiran Umer Chapra dalam Konteks Global**

Pemikiran Umer Chapra tidak hanya relevan untuk masyarakat Muslim tetapi juga memberikan solusi universal untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan instabilitas keuangan. Chapra menawarkan pendekatan holistik yang tidak hanya mengkritisi sistem kapitalisme tetapi juga memberikan alternatif yang aplikatif (Ilyas et al., 2023). Hal ini membuat pemikiran Chapra semakin relevan dalam konteks global, terutama

di tengah meningkatnya kebutuhan akan reformasi sistem ekonomi global yang lebih adil dan manusiawi.

Pemikiran Umer Chapra sangat relevan dalam menghadapi tantangan global terkait kesenjangan ekonomi. Ketimpangan distribusi kekayaan yang semakin melebar tidak hanya menjadi ancaman bagi stabilitas sosial tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan terhadap sistem ekonomi konvensional. Chapra menawarkan pendekatan yang berbasis pada keadilan distributif, di mana kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir individu atau negara, melainkan didistribusikan secara merata melalui mekanisme zakat, sedekah, dan sistem perpajakan yang adil (Chapra, 2000b). Hal ini memberikan alternatif nyata untuk mengatasi ketimpangan global yang kian memburuk.

Krisis keuangan global yang berulang kali terjadi, seperti pada tahun 2008, menunjukkan kelemahan mendasar dari sistem ekonomi berbasis riba dan spekulasi. Umer Chapra mengkritik sistem ini karena menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang merugikan banyak pihak, terutama mereka yang berada di kelas menengah dan bawah (Chapra, 1985). Sebagai alternatif, Chapra menawarkan sistem keuangan berbasis syariah yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan stabilitas (Gani, 2022). Dalam konteks global, pendekatan ini tidak hanya menarik perhatian negara-negara Muslim tetapi juga negara-negara non-Muslim yang mencari solusi untuk menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Dalam menghadapi isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, nilai-nilai Islam yang ditekankan oleh Umer Chapra memberikan perspektif penting. Prinsip Islam seperti tanggung jawab terhadap alam (*khalifah fil ardh*) dan pelarangan eksploitasi yang berlebihan menawarkan kerangka kerja untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dalam kebijakan ekonomi, hal ini diterjemahkan ke dalam pengelolaan sumber daya alam yang adil, investasi pada teknologi ramah lingkungan, dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Pendekatan ini relevan dengan agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diusung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Chapra menekankan pentingnya nilai-nilai moral dalam kebijakan ekonomi, yang relevan untuk mengatasi tantangan sosial di tingkat global. Dalam tatanan ekonomi yang sering kali didominasi oleh individualisme, Chapra menawarkan alternatif yang berbasis pada tanggung jawab sosial (Chapra, 2000a). Hal ini dapat diimplementasikan dalam kebijakan yang mendorong inklusivitas, seperti redistribusi kekayaan melalui pajak progresif dan program sosial berbasis dana zakat. Dengan mengadopsi nilai-nilai ini, kebijakan global dapat menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial, memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai belahan dunia.

Relevansi pemikiran Umer Chapra juga terletak pada potensinya untuk mereformasi sistem ekonomi global. Pendekatan berbasis nilai-nilai Islam yang ia tawarkan dapat menjadi model alternatif bagi negara-negara yang ingin menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil dan manusiawi. Chapra memberikan kerangka teoretis yang kuat untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan tetapi juga kesejahteraan kolektif dan keberlanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya etika dalam ekonomi, pemikiran Chapra memiliki peluang besar untuk diadopsi dalam diskursus kebijakan ekonomi global.

### **3.5 Tantangan dalam Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi**

Salah satu tantangan utama dalam implementasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi adalah kurangnya pemahaman yang mendalam dan komprehensif di kalangan pembuat kebijakan. Banyak yang hanya memahami nilai-nilai Islam pada tingkat normatif tanpa menggali lebih dalam bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan secara praktis dalam kebijakan ekonomi modern. Hal ini menyebabkan adopsi yang setengah hati atau bahkan salah tafsir terhadap prinsip-prinsip seperti zakat, keuangan syariah, atau pelarangan riba. Pendidikan dan pelatihan khusus bagi pembuat kebijakan diperlukan untuk memastikan pemahaman yang tepat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dominasi kapitalisme dalam tatanan ekonomi global menjadi hambatan besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada riba dan spekulasi telah tertanam kuat dalam struktur ekonomi dunia, sehingga sulit untuk digantikan atau diubah. Selain itu, tekanan dari institusi keuangan internasional dan investor global sering kali menghalangi negara-negara untuk mengadopsi kebijakan berbasis syariah. Negara-negara Muslim yang ingin menerapkan nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi sering kali harus berhadapan dengan dilema antara mempertahankan kedaulatan ekonomi mereka atau menyesuaikan diri dengan tuntutan sistem global (Haryadi, 2020).

Tantangan lain adalah adanya perbedaan interpretasi di kalangan ulama dan akademisi tentang bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam kebijakan ekonomi. Misalnya, pandangan yang berbeda tentang definisi riba atau cara mengelola dana zakat dapat mempengaruhi konsistensi implementasi kebijakan. Perbedaan ini sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan pembuat kebijakan dan masyarakat, sehingga menghambat adopsi nilai-nilai Islam secara luas. Diperlukan upaya harmonisasi dan standardisasi dalam interpretasi prinsip-prinsip ekonomi Islam agar dapat diterapkan dengan lebih konsisten.

Implementasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi juga memerlukan infrastruktur dan teknologi pendukung yang memadai. Misalnya, pengelolaan dana zakat atau wakaf secara modern membutuhkan sistem digital yang transparan dan efisien untuk memastikan distribusi yang adil dan akuntabel. Namun, banyak negara, terutama negara berkembang, masih menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi yang dapat menghambat proses ini. Selain itu, kurangnya lembaga keuangan syariah yang kuat juga menjadi kendala dalam menyediakan alternatif yang kompetitif terhadap sistem konvensional.

Di beberapa negara, penerapan nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi sering kali menghadapi tantangan sosial dan politik. Misalnya, resistensi dari kelompok tertentu yang merasa bahwa kebijakan berbasis syariah dapat bertentangan dengan prinsip sekularisme atau pluralisme. Selain itu, kurangnya dukungan politik dari pemimpin atau partai yang berkuasa juga dapat menghambat implementasi kebijakan ini. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan dialog yang inklusif antara berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam diterapkan dengan cara yang sesuai dengan konteks sosial dan politik masing-masing negara.

### **3.6 Rekomendasi untuk Kebijakan Ekonomi Berbasis Nilai-Nilai Islam**

Langkah pertama dalam mendorong kebijakan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam adalah dengan meningkatkan literasi ekonomi Islam di kalangan pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Pendidikan formal dan pelatihan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam harus diperluas untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang konsep seperti zakat, wakaf, pelarangan riba, dan keadilan distributive (Madani, 2021). Program literasi ini dapat dilakukan melalui institusi pendidikan, seminar, dan media massa. Dengan literasi yang lebih baik, masyarakat dapat lebih memahami manfaat dan relevansi nilai-nilai Islam dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam memerlukan kerangka regulasi yang jelas dan mendukung. Pemerintah perlu merancang regulasi yang memungkinkan pengelolaan zakat dan wakaf secara transparan, memastikan perlindungan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan, dan mendorong adopsi sistem keuangan berbasis Syariah (Adnan & Maarif, 2024). Selain itu, kebijakan fiskal seperti insentif pajak bagi lembaga yang mengelola zakat dan wakaf atau mendukung investasi berbasis syariah dapat mendorong partisipasi yang lebih luas. Regulasi yang kuat juga penting untuk memastikan bahwa implementasi nilai-nilai Islam berjalan secara konsisten dan adil.

Pemanfaatan teknologi modern dapat mendukung implementasi kebijakan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam secara lebih efisien dan transparan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu

mengembangkan platform digital untuk mengelola dana zakat, wakaf, dan sedekah, sehingga distribusi bantuan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Teknologi juga dapat digunakan untuk memfasilitasi transaksi keuangan syariah, seperti melalui aplikasi perbankan syariah atau pasar modal berbasis syariah. Dengan infrastruktur teknologi yang memadai, integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi dapat lebih efektif dan relevan dalam era digital saat ini.

Pengembangan kebijakan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam dapat diperkuat melalui kolaborasi antarnegara, terutama di antara negara-negara mayoritas Muslim. Negara-negara ini dapat berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kolaborasi ini juga dapat mencakup pembentukan lembaga internasional untuk mendukung keuangan syariah, pengelolaan zakat global, atau penelitian bersama tentang ekonomi Islam. Selain itu, negara-negara Muslim dapat mendorong partisipasi mereka dalam tatanan ekonomi global dengan mempromosikan nilai-nilai Islam sebagai solusi untuk tantangan ekonomi global.

Rekomendasi terakhir adalah mengembangkan produk dan instrumen ekonomi yang inovatif untuk mendukung implementasi nilai-nilai Islam. Contohnya adalah pengembangan sukuk hijau (green sukuk) untuk pembiayaan proyek berkelanjutan, wakaf produktif untuk mendukung sektor sosial, dan investasi berbasis etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk-produk ini tidak hanya relevan bagi masyarakat Muslim tetapi juga menarik minat pasar global yang semakin peduli terhadap etika dan keberlanjutan. Inovasi ini dapat meningkatkan daya saing ekonomi Islam di tingkat internasional sekaligus memperkuat relevansinya dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

#### **4. Kesimpulan**

Studi ini menemukan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi modern memiliki relevansi yang signifikan dalam menghadapi tantangan global seperti ketimpangan sosial, ketidakstabilan ekonomi, dan krisis lingkungan. Temuan utama mencakup berbagai bentuk implementasi, seperti redistribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf, stabilitas keuangan melalui sistem berbasis syariah, serta pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan. Pemikiran Umer Chapra memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan inklusif dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan distributif, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Dalam konteks global, integrasi nilai-nilai ini tidak hanya menawarkan solusi praktis tetapi juga paradigma alternatif yang dapat mengatasi kelemahan mendasar dari sistem ekonomi konvensional.

Secara konseptual, studi ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang relevansi nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi modern, terutama melalui kerangka berpikir holistik yang ditawarkan oleh Umer Chapra. Dari sisi metode, kajian ini menyoroti pentingnya pendekatan multidisipliner yang menggabungkan nilai-nilai moral dan prinsip ekonomi untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif. Temuan ini juga memberikan sumbangsih teoretis dengan mengidentifikasi potensi inovasi dalam pengelolaan instrumen ekonomi Islam, seperti sukuk hijau dan wakaf produktif. Dengan demikian, studi ini tidak hanya relevan bagi komunitas Muslim tetapi juga memberikan wawasan yang dapat diadopsi dalam tatanan ekonomi global yang lebih luas.

Namun, studi ini memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan dalam penelitian selanjutnya. Salah satu kelemahan utama adalah keterbatasan data empiris tentang implementasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi di berbagai negara. Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam di berbagai konteks sosial dan budaya dapat memengaruhi generalisasi temuan. Studi ini juga belum sepenuhnya mengeksplorasi tantangan politik dan sosial yang mungkin muncul dalam implementasi kebijakan berbasis Islam. Oleh karena itu, penelitian di masa depan diharapkan dapat mengatasi kelemahan ini dengan mengadopsi pendekatan yang lebih empiris dan

komparatif untuk memperkaya wawasan tentang integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi modern

## 5. Daftar Pustaka

- [1] Adam, M. (2020). Paradigma keuangan islam dalam menghadapi krisis. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah ISSN (P)*, 2597–4904.
- [2] Adam, M. N. A. S., Hamin, D. I., & Hasim, H. (2024). Perbandingan Sistem Ekonomi Socialisme, Kapitalisme, dan Ekonomi Syariah: Sebuah Analisis Kritis terhadap Prinsip, Implementasi, dan Dampak Sosial. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 7(2), 1011–1024.
- [3] Adnan, M., & Maarif, S. (2024). Membangun Model Ekonomi Islam yang Berkelanjutan: Tantangan dan Perspektif dari Fiqih dan Ushul Fiqih. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 97–126.
- [4] Al Arif, M. N. R. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Pustaka Setia.
- [5] Chapra, M. U. (1985). *Towards a Just Monetary System*. The Islamic Foundation.
- [6] Chapra, M. U. (2000a). *Islam dan tantangan ekonomi*. Gema Insani.
- [7] Chapra, M. U. (2000b). *Sistem moneter islam*. Gema Insani.
- [8] Desiana, R., & Afrianty, N. (2017). Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- [9] Fadllan, F. (2018). Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam Telaah Pemikiran M. Umer Chapra. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 15(2), 393–426.
- [10] Gani, A. A. (2022). Studi Komparatif Tentang Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Konvensional: Sebuah Perbandingan Metodologi Dan Praktik. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 4(2), 207–226.
- [11] Hanani, G. Q., & Kurniaty, V. (2022). Relevansi Pemikiran Ekonomi Menurut Umer Chapra Dan Konsep Uang Menurut Al-Ghazali. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 196–204.
- [12] Haryadi, Y. (2020). *Peran Koperasi Dalam Kebangkitan Ekonomi Umat*. tre Media Digital.
- [13] Ilyas, R., Pribadi, R. M., Sayuti, M. N., Syarif, A. H., Shofawati, A., Iqbal, M., Hastuti, E. W., & Fachri, A. (2023). *Buku ajar: Pengantar Ekonomi Islam*. Az-Zahra Media Society.
- [14] Madani, M. T. (2021). AGAMA DAN PENDIDIKAN: ANALISIS RELASI DAN IMPLIKASINYA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN EKONOMI. *IQTISODINA*, 4(2), 162–180.
- [15] Mufid, M. (2021). *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*. Prenada Media.
- [16] Novanda, R. (2023). Religion and Environment: Transintegration of Science in Realizing Environmental Sustainability. *Journal of Applied Transintegration Paradigm*, 3(2 Desember).
- [17] Putra, B. P. (2022). LITERATURE REVIEW DALAM PENELITIAN EKONOMI SYARIAH. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*.
- [18] Qotrunnada, A., & Yazid, M. (2022). Analisis Tantangan Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Pembiayaan. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 4(1), 45–59.
- [19] Rahman, H. (2017). Potret pertumbuhan ekonomi, kesenjangan dan kemiskinan di Indonesia dalam tinjauan ekonomi politik pembangunan. *Ilmu Dan Budaya*, 40(55).
- [20] Rangkuti, R. A., & Arif, M. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra dalam Konteks Era Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 348–352.
- [21] Syarif, N., & Prawito, P. S. (2020). Pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia: Studi kasus perkembangan keuangan komersial syariah dan keuangan sosial syariah. *Economica, Jurnal Ekonomi Islam*.
- [22] Tjiptono, F. (2023). *Riset pemasaran*. Penerbit Andi.
- [23] Wulansari, S. D., & Setiawan, A. H. (2013). *Analisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik (penerima zakat)(studi kasus rumah zakat kota semarang)*.

Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

- [24] Zainul Bahri, S. E., Aprilianti, D. R. V., & SSTP, M. E. (2023). *Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan Pemahaman Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Klasik, Neoklasik, Islam, Green Economy, dan Blue Economy*. Nas Media Pustaka.
- [25] Zuchroh, I. (2024). PRINSIP Keadilan Ekonomi dalam Prespektif Islam dan Implementasinya. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 12(2), 135–139.